

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Perindustrian No.150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam penyampaian Laporan Kinerja ini, segala informasi telah dilakukan secara terintegrasi dan berkala melalui pelaporan kinerja triwulan selama tahun 2015.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat I atas penggunaan anggaran, laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja dan sebagai upaya perbaikan bagi Inspektorat I untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat I yang dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, di dalam melaksanakan tugas Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam pengembangan sektor industri.

Jakarta, Januari 2016

Inspektur I

**Pranata**

## **IKHTISAR EKSEKUTIF** **(EXECUTIVE SUMMARY)**

Sesuai dengan dinamika reformasi birokrasi dewasa ini, terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sehingga hasil diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang baik, transparan, terukur, dan sesuai ketentuan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana secara, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Agar fungsi - fungsi pengawasan dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2015 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan di tempuh .

Arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2015 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan;
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan dengan mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
7. Menerapkan audit berbasis resiko.

Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui penetapan kebijakan teknis, program, dan kegiatan pengawasan. Berdasarkan pelaksanaan program tahun 2015, nilai capaian kinerja Inspektorat I termasuk dalam kategori **sangat baik** dengan capaian yaitu 99,03 % yang terdiri dari:

a. Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)

- 1) Meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undang dengan berhasil memenuhi target Persentase temuan BPK dibawah materiality threshold < 3% (realisasi 0,3324%)
- 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan Memperoleh Predikat BB pada Nilai SAKIP Kementerian
- 3) Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik dengan pencapaian Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum sebesar 104,76%
- 4) Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal dengan terpenuhinya target 133,34 % pada Jumlah satuan kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern hingga level 3
- 5) Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri

b. Perspektif Proses Internal

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan dengan Pencapaian Persentase Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT, Persentase pengawasan yang sesuai pedoman dan prosedur /standar pengawasan serta Opini BPK atas laporan keuangan kementerian sebesar 104,84%

c. Perspektif Pembelajaran Organisasi

- 1) Meningkatnya kemampuan SDM APIP dengan pencapaian Persentase pegawai yang sesuai diklat dari seluruh pegawai Inspektorat I, Pencapaian indikator Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan pada tahun 2015, dari target sebanyak 4 (empat) auditor, gagal untuk dipenuhi atau tidak ada auditor yang mempublikasikan karya tulisnya.
- 2) Organisasi yang efektif dengan pencapaian Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat I dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :2008 sebesar 100 %
- 3) Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dengan Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan dan Persentase penyerapan anggaran Inspektorat I yang sudah mencapai target 93,88%

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI</b> .....	1
<b>B. STRUKTUR ORGANISASI</b> .....	1
<b>C. CAKUPAN TUGAS</b> .....	2
<b>D. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM</b> .....	3
<b>II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	5
<b>A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI</b> .....	5
<b>B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015</b> .....	7
<b>C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015</b> .....	8
<b>D. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA</b> .....	10
<b>E. RENCANA ANGGARAN</b> .....	11
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	122
<b>A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA</b> .....	133
<b>B. AKUNTABILITAS KEUANGAN</b> .....	233
<b>IV. P E N U T U P</b> .....	255
<b>A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN</b> .....	255
<b>B. PERMASALAHAN/KENDALA</b> .....	2727
<b>C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN</b> .....	2727
<b>LAMPIRAN</b> .....	2829
<b>Sumber Daya Manusia di Inspektorat I</b> .....	28
<b>Formulir Penetapan Kinerja Inspektorat I Tahun 2015</b> .....	29

## I. PENDAHULUAN

### A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sebagai bagian dari struktur organisasi Inspektorat Jenderal, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, dan Pusat Komunikasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
2. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Inspektorat I.

### B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No105/M-IND/PER/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari :

- Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja
- Kelompok jabatan fungsional auditor.

**Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta manajemen kinerja Inspektorat I. Secara fungsional Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja bertanggung jawab kepada Inspektur I dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tatausaha dan Kepegawaian.

**Kelompok Jabatan Fungsional Auditor** mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan

fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

### **C. CAKUPAN TUGAS**

Sesuai dengan Penetapan Cakupan Tugas Objek Pengawasan Unit Vertikal di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang ditetapkan dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor. 132/IJ-IND/PER/11/2010, Inspektorat I memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit dan reviu, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di satuan kerja/unit:

1. Unit Pusat, yaitu:
  - a) Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi,
  - b) Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, dan
  - c) Pusat Komunikasi dan Publik.
2. Unit Vertikal Balai Besar dan Baristand Industri, yaitu:
  - a) Balai Besar Keramik Bandung
  - b) Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung
  - c) Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang
  - d) Balai Sertifikasi Industri Jakarta
  - e) Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh
  - f) Balai Riset dan Standardisasi Industri Padang
  - g) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon
3. Unit Vertikal Sekolah dan Balai Diklat, yaitu:
  - a) Perguruan Tinggi Kimia Industri (PTKI) Medan
  - b) Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Makassar
  - c) Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Bogor
  - d) Sekolah Teknologi Manajemen Industri (STMI) Jakarta
  - e) Balai Diklat Industri (BDI) Makassar
  - f) Balai Diklat Industri (BDI) Yogyakarta
4. Dinas/Satker yang menangani Perindustrian di Provinsi (Dekonsentrasi), yaitu:
  - a) Dinas perindag Prov. Sumatera Selatan
  - b) Dinas perindag Prov. Lampung
  - c) Dinas perindag Prov. Jawa Timur

- d) Dinas perindag Prov Bali
- e) Dinas perindag Prov. Kalimantan Tengah
- f) Dinas perindag Prov. Sulawesi Utara
- g) Dinas perindag Prov. Sulawesi Selatan
- h) Dinas perindag Prov. Maluku Utara

#### **D. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi tersebut, Inspektorat I telah menyusun kegiatan tahun 2015 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2015, Inspektorat I melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2015 dan menunjang program Inspektorat Jenderal, melalui Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I.

Pelaksanaan kegiatan / program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2015 yakni :

- Mengoptimalkan peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- Menyempurnakan sistem dan prosedur dalam pengawasan sebagai upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat I melaksanakan kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat dan Vertikal, Pengawasan Dekonsentrasi Perindustrian, dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu / Riksus** sesuai dengan cakupan tugas berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 132/IJ-IND/PER/II/2010 sebagaimana telah disampaikan di atas.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel, Inspektorat I juga melaksanakan kegiatan **Reviu Laporan Keuangan/BMN** di unit satker pusat dan vertikal yang menjadi cakupan tugasnya. Serta sebagai pengawas intern Kementerian/Lembaga, APIP juga memiliki tugas untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) terhadap perencanaan penganggaran sesuai dengan PMK No.136 tahun 2014. Oleh karena itu, pada tahun 2015 Inspektorat I juga mendapatkan amanah untuk melaksanakan kegiatan **Reviu Perencanaan dan Program** terhadap seluruh unit kerja di bawah cakupan tugas

Inspektorat I agar penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran dilakukan sesuai kaidah peraturan yang berlaku.

Sedangkan dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat I melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan yang terbagi menjadi **Monev Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** untuk satuan kerja eselon I, **Monev Penyelenggaraan SNI Wajib** terhadap unit pusat dan vertikal yang menyelenggarakan kegiatan sertifikasi.

Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut, Inspektorat I melaksanakan kegiatan Layanan Manajemen Pengawasan Kinerja serta Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Pengawasan.

## II. PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan stratejik merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan stratejik yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian No. 11/IJ-IND/PER/ 1/2011 dan sebagai salah satu bagian dari struktur organisasi Inspektorat Jenderal, Inspektorat I sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi dan misi yang mendukung penetapan dan pelaksanaan visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, yakni:

#### **VISI :**

***"Terwujudnya pengawasan intern sebagai mitra kerja dan penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri".***

#### **MISI :**

1. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pengembangan industri;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Dalam mewujudkan dan melaksanakan hal tersebut di atas, maka perencanaan strategis Inspektorat Jenderal merupakan suatu komitmen dari serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Inspektorat Jenderal dalam rangka pencapaian **tujuan pengawasan** dalam memberikan nilai tambah dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kementerian Perindustrian dengan cara

1. Menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kementerian Perindustrian berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN; dan
3. Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sasaran pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat I antara lain sebagai berikut :

1. Terciptanya sistem pengawasan berbasis pembinaan, dengan indikator kinerja utama menurunnya tingkat penyimpangan/ penyelewengan.
2. Meningkatnya profesionalisme tenaga pengawas / auditor, dengan indikator kinerja utama : 1) Tenaga Pengawas/ Auditor yang mampu memberikan pembinaan dan 2) Tenaga Pengawas/ Auditor yang memiliki kompetensi/ sertifikasi.
3. Merumuskan pedoman pemantauan dan evaluasi, dengan indikator kinerja utama tersedianya Pedoman pemantauan dan evaluasi
4. Melakukan Kajian Hasil Audit Kinerja dan Audit dengan tujuan tertentu, dengan indikator kinerja utama Laporan Kajian Hasil Audit Kinerja dan Audit tertentu.
5. Melakukan Evaluasi Hasil Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dengan indikator kinerja utama Laporan evaluasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
6. Mengoptimalkan Pemanfaatan Pelaporan Hasil Pengawasan, dengan indikator kinerja utama tersedianya laporan hasil pengawasan sebagai bahan pengambilan keputusan.
7. Melakukan evaluasi hasil reviu dan SPIP, dengan indikator kinerja utama tersedianya laporan hasil evaluasi reviu dan SPIP.
8. Melakukan kajian hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan industri, dengan indikator kinerja utama tersedianya laporan kajian hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan industri.
9. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pengawasan dengan stakeholder, dengan indikator kinerja utama tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
10. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan indikator kinerja utama menurunnya jumlah penyimpangan/ temuan.
11. Meningkatkan Kemampuan SDM Aparat Pengawas, dengan indikator kinerja utama tersedianya SDM aparat pengawas yang telah mengikuti diklat.
12. Meningkatkan ketatalaksanaan Sistem Administrasi, dengan indikator kinerja utama terlaksananya tertib administrasi.

## **B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada Tahun 2015 Inspektorat I memiliki program dan kegiatan melaksanakan **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian**, dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketaatan terhadap perundang – undangan melalui pengawasan kinerja unit pusat, vertikal dan pengawasan kinerja dekonsentrasi di bawah cakupan tugas Inspektorat I dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan tingkat materialitas temuan minimal.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja melalui monitoring dan evaluasi SAKIP pada unit eselon I di bawah cakupan tugas Inspektorat I dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa hasil evaluasi penilaian Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah unit satuan kerja di bawah cakupan tugas Inspektorat I.
3. Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik melalui pengawasan kinerja unit pusat dan vertikal di bawah cakupan tugas Inspektorat I dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa laporan penyelenggaraan dan kesesuaian pelayanan publik unit kerja Pusat/Vertikal dengan standar pelayanan minimal.
4. Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal melalui pengawasan dengan tujuan tertentu dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa laporan hasil pengawasan/pemeriksaan, pembinaan dan konsultasi serta analisis risiko.
5. Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri melalui monitoring dan evaluasi SNI Wajib Bidang Elektronika dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan/program SNI Wajib Bidang Elektronika beserta rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan kebijakan.
6. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan melalui Reviu Keuangan/BMN unit pusat dan vertikal di bawah cakupan tugas Inspektorat I serta Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat I dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa laporan hasil Review Laporan Keuangan/BMN unit kerja Pusat/Vertikal.
7. Meningkatnya kemampuan SDM APIP melalui Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat I dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa terlaksananya koordinasi dan konsultasi internal/eksternal pengawasan inspektorat I serta Laporan Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat I.

8. Organisasi yang efektif melalui Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Insepektorat I serta Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat I dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa Laporan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Inspektorat I.
9. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas melalui Reviu RKA-K/L unit pusat, vertikal dan dekonsentrasi di bawah cakupan tugas Inspektorat I serta Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Insepektorat I dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa laporan hasil Review RKA-K/L unit kerja Pusat/Vertikal serta dekonsentrasi.

### **C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015**

Dalam rangka mewujudkan terciptanya sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif yang tertuang pada rencana kinerja, Inspektorat I menetapkan kinerja yang dilaksanakan tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam TAPKIN Inspektorat I sebagai berikut:

- Meningkatnya ketaatan terhadap perundang – undangan
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja
- Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik
- Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal
- Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri
- Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan
- Meningkatnya kemampuan SDM AP/IP
- Organisasi yang efektif
- Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas

Guna mewujudkan sasaran yang tertuang dalam TAPKIN tersebut maka indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold
- Nilai SAKIP Kementerian
- Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal
- Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum
- Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3
- Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti

- Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT
- Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan
- Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian
- Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat I
- Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan
- Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan
- Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat I
- Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008
- Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan
- Persentase penyerapan anggaran Inspektorat I

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dicapai melalui:

- Meningkatnya ketaatan terhadap perundang – undangan melalui **pengawasan kinerja** unit pusat, vertikal dan pengawasan kinerja dekonsentrasi di bawah cakupan tugas Inspektorat I
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja melalui **monitoring dan evaluasi SAKIP** pada unit eselon I di bawah cakupan tugas Inspektorat I
- Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik melalui **pengawasan kinerja** unit pusat dan vertikal di bawah cakupan tugas Inspektorat I
- Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal melalui **pengawasan dengan tujuan tertentu**
- Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri melalui **monitoring dan evaluasi SNI Wajib Bidang Elektronika**
- Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan melalui **Reviu Keuangan/BMN** unit pusat dan vertikal di bawah cakupan tugas Inspektorat I serta Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat I
- Meningkatnya kemampuan SDM APiP melalui **Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat I**
- Organisasi yang efektif melalui **Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja** Pengawasan Insepektorat I serta Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat I

- Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas melalui **Reviu RKA-K/L** unit pusat, vertikal dan dekonsentrasi di bawah cakupan tugas Inspektorat I serta Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Insepektorat I.

#### D. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA

Pada tahun 2015, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektorat I telah menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target sebagai berikut :

Tabel 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam TAPKIN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
<i>Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder</i>		
Meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undangan	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	< 3 persen
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B
	Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal	85 persen
Meningkatnya integritas pelayanan publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 persen
Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3	6 Satker
Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	1 Rekomendasi Kebijakan
<i>Perspektif Proses Internal</i>		
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 persen
	Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan	80 persen
	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian	WTP
<i>Perspektif Pembelajaran Organisasi</i>		
Meningkatnya kemampuan SDM	Persentase pegawai yang	90 persen

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
APIP	mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat I	
	Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan	4 Orang
	Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90 persen
Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat I	B
	Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	1 Sertifikat
Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 persen
	Persentase penyerapan anggaran Inspektorat I	90 persen

#### E. RENCANA ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, tugas pokok dan fungsi tersebut pada tahun 2015 Inspektorat I mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.376.517.000,- dengan rincian per program/kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan kinerja Inspektorat I terhadap unit kerja dan satuan kerja pada Kementerian Perindustrian, dekonsentrasi serta pemeriksaan khusus sebesar Rp. 1.251.090.000,-
2. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan atas kualitas penyajian laporan keuangan yang sesuai SAP di 16 satker unit pusat/vertikal dan Reviu Perencanaan Program dan Anggaran sebesar Rp. 686.370.000,-
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Program/Kebijakan Inspektorat I yang meliputi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SAKIP pada Ditjen IUBTT dan BPPI serta Kebijakan/Program Aktual SNI Wajib bidang Elektronika sebesar Rp. 857.276.000,-
4. Manajemen Pengawasan Inspektorat I dalam rangka mendukung kegiatan rutin sebesar Rp. 390.900.000,-.
5. Dokumen Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat I sebesar Rp. 190.881.000,-

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur I kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Inspektorat I Kementerian Perindustrian pada tahun 2015. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat I dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat I. Pada pengukuran kinerja diuraikan pula secara sistematis mengenai penetapan indikator kinerja, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pemenuhan indikator kinerja tersebut.

Indikator kinerja Inspektorat I dikelompokkan menjadi 5 kelompok indikator kinerja yaitu :

1. **Indikator Masukan (*Input*)** : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output
2. **Indikator Keluaran (*Output*)** : sesuatu bentuk produk/ jasa (kuantitas dan/atau kualitas) yang dihasilkan langsung oleh program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.
3. **Indikator Hasil (*Outcome*)** : sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan output program dan kegiatan.
4. **Indikator manfaat (*Benefit*)** : sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. **Indikator dampak (*Impact*)** : ukuran tingkat pengaruh lingkungan yang ditimbulkan oleh keluaran dari suatu program.

Terhadap hasil kinerja Inspektorat I menggunakan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

85 s/d 100	=	Sangat Baik
70 s/d < 85	=	Baik
55 s/d < 70	=	Sedang
< 55	=	Kurang Baik

## A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum Inspektorat I telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 105/M-IND/PER/10/2010 yang merupakan tanggung jawab organisasi. Berdasarkan evaluasi nilai capaian yang dilakukan terhadap **pencapaian kinerja kegiatan Inspektorat I tahun 2015** termasuk dalam kategori **sangat baik**.

### Analisis Capaian TAPKIN

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Inspektorat I yang diturunkan dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal maka Inspektorat I menetapkan indikator kinerja untuk setiap sasarnya, hasil dari capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan IV (Januari s.d. Desember) Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Capaian TAPKIN Inspektorat I Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder</i>			
Meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undangan	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	< 3 persen	0,3324 %
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B	BB
	Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal	85 persen	67,96 %
Meningkatnya integritas pelayanan publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 persen	78,57 %
Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3	6 Satker	8 Satker
Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
<i>Perspektif Proses Internal</i>			
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 persen	94,63 %
	Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan	80 persen	87,5 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian	WTP	WTP
<i>Perspektif Pembelajaran Organisasi</i>			
Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat I	90 persen	93,33 %
	Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan	4 Orang	Tidak ada
	Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90 persen	100 %
Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat I	B	B
	Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	1 Sertifikat	1 Sertifikat
Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 persen	90 %
	Persentase penyerapan anggaran Inspektorat I	90 persen	93,88 %

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

### ***Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder***

#### **1. Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan**

Indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan tercapainya persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold*, yaitu 3% untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA. 2014. Capaian sasaran secara umum **sangat baik** sebesar **100%**, sedangkan rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undangan	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	< 3 persen	0,3324 %	100

Nilai temuan BPK untuk hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA. 2014 adalah sebesar Rp 8.830.323.972,43 dari total Pagu

anggaran Kementerian Rp 2.656.276.729.000,- atau sebesar 0.3324%. Melihat dari capaian kinerja yang telah melampaui target, indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil, namun masih perlu ditingkatkan kembali pengendalian internal yang dilakukan oleh KPA dan PPK terhadap realisasi kegiatan diseluruh tahapan, terutama terkait dengan realisasi keuangan, agar tingkat materialitas temuan BPK pada Kementerian Perindustrian dapat ditekan seminimal mungkin.

## 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan tercapainya predikat SAKIP Kementerian Perindustrian dengan target skor 70 (predikat B) dan persentase Unit Eselon I dalam cakupan tugas Inspektorat I sebesar 85 persen. Capaian sasaran secara umum **sangat baik** rata-rata persentase realisasi sebesar **92,76%**, sedangkan rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B	BB	105,57
		Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal	85 persen	67,96 %	79,95

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (skor 72,69 atau capaian 103,80%), realisasi nilai SAKIP Kementerian yang diperoleh pada tahun ini mengalami peningkatan dimana skor yang berhasil dicapai adalah 73,90 atau mencapai sebesar 105,57% dari target yang ditetapkan.

Pencapaian dari indikator persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I untuk SAKIP Eselon I pada unit kerja dalam cakupan pengawasan Inspektorat I adalah BPKIMI dengan capaian sebesar 76,01% (predikat A) dan Direktorat Jenderal IUBTT sebesar 59,90% (predikat CC). Nilai akhir dari hasil evaluasi SAKIP tersebut telah diplenokan dan disampaikan kepada Biro Perencanaan sehingga rata-rata persentase nilai mencapai sebesar 67,96%.

Melihat dari capaian kinerja yang telah tergolong sangat baik, indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil, namun masih perlu ditingkatkan kembali kemampuan SDM Aparatur dalam melaksanakan SAKIP sesuai dengan standar/peraturan yang berlaku juga perlu terus ditingkatkan baik dengan sosialisasi peraturan dan penyusunan pedoman pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kementerian Perindustrian, maupun pelatihan/*workshop* penyusunan LAKIP yang merupakan produk akhir dari SAKIP. Selain itu, SDM aparatur pengawasan juga diharapkan tidak hanya

memberikan penilaian/predikat SAKIP unit kerja tapi juga dapat memantau pencapaian sasaran strategis Kementerian secara keseluruhan. Sehingga nantinya kinerja pengembangan industri benar-benar dapat terukur dan solusi/rekomendasi terbaik dapat dijalankan bersama dalam mencapai visi dan misi Kementerian Perindustrian.

### 3. Meningkatnya integritas pelayanan publik.

Dalam mencapai sasaran strategis peningkatan integritas pelayanan publik dapat diukur melalui Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum. Capaian sasaran ini secara umum **sangat baik** sebesar yakni **104,76%**, sedangkan rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
3	Meningkatnya integritas pelayanan publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 persen	78,57 %	104,76

Pencapaian dari indikator kinerja pada tahun 2015 adalah 78,57% dimana dari 14 unit yang memberikan pelayanan publik masih terdapat 3 unit belum menerapkan standar pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, yaitu pada Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung, Ditjen IUBTT dan BDI Yogyakarta. Pada Balai Besar Pulp dan Kertas, menurut SOP, semua penerimaan jasa layanan harus melalui bagian kerjasama. Namun dalam pelaksanaannya bagian PJT dan Kerjasama pada Balai Besar Pulp dan Kertas, masing – masing masih menerima jasa layanan.

Pada Ditjen IUBTT, kelemahan penerapan SOP masih terlihat pada proses penerbitan rekomendasi atau pertimbangan teknis produk industri. Keterlembatan penerbitan rekomendasi atau pertimbangan teknis produk industri oleh Ditjen IUBTT masih cukup sering dikeluhkan oleh penerima layanan. Untuk kelemahan penerapan SOP pada BDI Yogyakarta, dapat ditemukan pada alur peminjaman kamar/ruangan, dimana tidak seluruhnya tercatat/terdokumentasi dengan baik.

Walaupun demikian, secara umum kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian mengalami peningkatan dari tahun 2014. Pada tahun tersebut, nilai capaian pelayan publik pada Balai Besar dan Baristand Industri dibawah cakupan tugas pengawasan Inspektorat I adalah 77,59 %. Adanya peningkatan ini tidak lepas dari semakin optimalnya Unit Pelayanan Publik di masing-masing Satker dalam menjalankan fungsinya yang didukung dengan berbagai peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu, Inspektorat juga terus menjalankan fungsinya untuk

melakukan pengawasan kinerja, yang didalamnya mencakup aspek pelayanan publik, serta didukung adanya pengawasan oleh masyarakat/pengguna layanan melalui sistem pengaduan masyarakat secara *online* dimana masyarakat dapat menuliskan berbagai pengaduan, termasuk penyalahgunaan wewenang oleh aparat kementerian, pungutan liar atau pemberian pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal.

#### 4. Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal

Indikator untuk untuk mencapai sasaran tersebut diukur melalui banyaknya Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3. Capaian sasaran ini secara umum **sangat baik** sebesar yakni **133,34%**, sedangkan rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
4	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3	6 Satker	8 Satker	133,34

Salah satu kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa Satuan Kerja telah Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3 adalah telah tersedianya Peta Risiko satuan kerja. Satuan kerja yang telah membuat dan mengumpulkan peta risiko dianggap telah mencapai level 3. Pada tahun 2015, dari 16 satker yang termasuk dalam cakupan pengawasan Inspektorat I, terdapat 8 satker yang telah menerapkan sistem pengendalian internal hingga level 3, yaitu Ditjen IUBTT, BPKIMI, Pusat Komunikasi Publik, BBK Bandung, BBPK Bandung, Baristand Ambon, SMAK Bogor serta Balai Sertifikasi Industri (BSI) Jakarta. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 6 satker, maka realisasi pada tahun 2015 telah mencapai sasaran dengan 8 satker atau persentase sebesar 133,34%.

#### 5. Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri

Indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut adalah jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri. Secara umum sasaran capaian kegiatan ini **sangat baik** mencapai **100%**, karena dari target awal 1 rekomendasi, seluruhnya telah tercapai. Rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
5	Meningkatnya kualitas	Jumlah rekomendasi	1	1	100

	evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan	
--	-----------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--

Pada tahun 2014, Capaian dari target ini adalah 1 rekomendasi perbaikan untuk kebijakan industri dalam bidang industry perlampuan di Indonesia terkait dengan penerapan SNI wajib untuk Lampu Hemat Energi dengan tipe swaballast atau persentase capaian 100%. Untuk tahun 2015, Inspektorat I telah melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SNI Wajib Bidang Elektronika untuk Produk Pompa Air dan menghasilkan 1 rekomendasi terkait kebijakan pelaksanaan SNI Wajib tersebut. Rekomendasi terhadap kegiatan tersebut antara lain:

No	Kegiatan	Deskripsi	Indikator Keberhasilan
1	Melakukan sosialisasi mengenai SNI wajib	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi terhadap masyarakat mengenai mekanisme perolehan SNI wajib dan manfaat pemberlakuan SNI wajib</li> <li>- Membangun pusat informasi untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat/ industri (sebagai pusat komunikasi yang mudah diakses)</li> <li>- Pemasangan iklan di TV / atau SMS blast / pemasangan iklan di tempat strategis (bandara, pesawat, sekolah-sekolah)</li> <li>- Penerbitan buku saku yang disebar di tempat-tempat umum.</li> <li>- Menciptakan slogan-slogan yang mudah dikenal dan melekat di masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme perolehan SNI</li> <li>- Meningkatnya jumlah pengguna yang memanfaatkan fasilitas pada pusat informasi</li> <li>- Meningkatnya jumlah gerai / agen pemasok produk yang menggaungkan SNI</li> <li>- Tumbuhnya <i>brand image</i> bahwa produk SNI sebagai pilihan (tidak hanya untuk produk tertentu)</li> <li>- Meningkatnya penguasaan teknologi pompa air</li> <li>- Berkembangnya industri pompa air</li> </ul>
2	Melakukan dukungan teknologi terhadap industri (intervensi pemerintah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan pusat teknologi terkait pompa air</li> <li>- Melakukan Litbang/kajian untuk mendorong teknologi industri komponen lokal</li> <li>- Mendorong aliansi strategis dengan negara maju untuk</li> </ul>	

No	Kegiatan	Deskripsi	Indikator Keberhasilan
		transfer teknologi	
3	Meningkatkan kesiapan dari segala aspek infrastruktur pendukung SNI wajib	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat direktori LPK (karena regulasi dalam penunjukan LPK belum tersosialisasi)</li> <li>- Melakukan penguatan Balai dan laboratorium uji pendukung SNI wajib pompa air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tumbuhnya pemahaman industri mengenai LPK yang dapat mensertifikasi SNI</li> <li>- Tumbuhnya `trust` kepercayaan masyarakat terhadap SNI</li> </ul>
4	Mengembangkan sistem kluster industri elektronika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan fasilitasi penguatan dan pengembangan kluster</li> <li>- Melakukan Perbaikan dan peningkatan iklim usaha industri</li> <li>- Melakukan pengembangan dan penumbuhan industri komponen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri</li> <li>- Meningkatnya iklim usaha industri elektronika</li> </ul>

### ***Perspektif Proses Internal***

#### **1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan**

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diatas, yaitu Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai dengan PKPT, Persentase pengawasan yang sesuai dengan Pedoman dan Prosedur/Standar Pengawasan serta Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian. Capaian sasaran secara umum **sangat baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **104,84%**, sedangkan rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 persen	94,63 %	105,14
		Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan	80 persen	87,50 %	109,38
		Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian	WTP	WTP	100

Pencapaian dari indikator persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT adalah 94,63%, dimana pelaksanaan PKPT dilaksanakan reuiu pada 16 unit

satker dan audit kinerja pada 3 unit satker pengawasan Inspektorat I. Namun seiring dengan penugasan dari Inspektur I, maka dilakukan revisi PKPT sesuai dengan keperluan penugasan. Nilai dari indikator persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT sebenarnya masih bisa ditingkatkan melalui koordinasi yang intensif antara Inspektorat I dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal. Hal ini dikarenakan penugasan diluar PKPT pada umumnya berasal dari Sekretariat Inspektorat Jenderal, baik berupa kegiatan penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal maupun Disposisi Inspektur Jenderal kepada Inspektur I.

Pencapaian indikator persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan dihitung berdasarkan pada pengawasan yang menggunakan kartu kendali, yaitu audit kinerja dengan cara membandingkan kartu kendali audit kinerja yang sesuai dengan jumlah semua audit kinerja, yaitu 24 unit satker pengawasan atau 87,50%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelum dengan Indikator kinerja sejenis, Persentase pengawasan yang sesuai dengan Pedoman dan Prosedur/ Standar Pengawasan meningkat dari sebelumnya (tahun 2014) dimana hanya mencapai realisasi 76,82%. Peningkatan tersebut terjadi karena dilakukannya monitoring setiap bulannya dan penjadwalan secara berkala.

Untuk Indikator kinerja Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian, diukur melalui tingkat kualitas laporan keuangan dengan hasil akhir opini dari BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didahului dengan penilaian/reviu laporan keuangan dan BMN oleh Inspektorat Jenderal. Adapun capaian indikator Tingkat kualitas laporan keuangan adalah WTP berdasarkan penilaian dari pihak BPK – RI yang didahului dengan pelaksanaan reviu laporan keuangan di 16 satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I secara tepat waktu. Tidak terdapat perbedaan hasil antara tahun 2014 dengan 2015, yakni opini WTP. Keberhasilan untuk mempertahankan predikat WTP tidak terlepas dari komitmen Inspektorat Jenderal untuk terus melakukan pendampingan, baik melalui kegiatan reviu laporan keuangan/BMN dan RKA-K/L serta berbagai kegiatan konsultasi yang aktif dilakukan secara langsung atau melalui klinik Inspektorat Jenderal.

## ***Perspektif Pembelajaran Organisasi***

### **1. Meningkatnya Kemampuan SDM APIP**

Terkait sasaran Meningkatnya Kemampuan SDM APIP, Inspektorat I menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diatas, yaitu

Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat I, Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan serta Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan. Capaian sasaran secara umum **baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **71,60%**. Sedangkan rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat I	90 persen	93,33 %	103,70
		Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan	4 Orang	Tidak ada	0
		Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90 persen	100 %	111,11

Untuk Indikator kinerja Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat I dengan target 90%, berhasil dipenuhi sebesar 93,33%. Nilai tersebut didasarkan atas data keikutsertaan diklat Inspektorat I, dimana dari 15 orang pegawai pada Inspektorat I, tercatat sebanyak 10 orang pegawai yang mengikuti diklat pada tahun 2015. Pada tahun tersebut, terdapat 4 (empat) diklat/workshop, baik diselenggarakan oleh pihak Sekretariat Inspektorat Jenderal maupun pihak luar, yang ditawarkan untuk diikuti oleh pegawai di Inspektorat I, yaitu Workshop Pembuatan PKA Audit Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi, Konsultansi dan Pelayanan Publik, Workshop Audit Pengadaan Jasa Konsultansi, Diklat *Communication for Internal Auditors* serta Workshop Penyusunan Pedoman Akuntabilitas Kinerja.

Pencapaian indikator Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan pada tahun 2015, dari target sebanyak 4 (empat) auditor, gagal untuk dipenuhi atau tidak ada auditor yang mempublikasikan karya tulisnya. Tidak tercapainya indikator tersebut dikarenakan beban kerja auditor yang cukup tinggi pada tahun 2015 berupa penugasan diluar PKPT yang telah ditetapkan, seperti permohonan dari satker untuk melakukan cek fisik bantuan peralatan/mesin dalam rangka hibah, pemeriksaan khusus terkait aduan masyarakat serta reuiu RKA-K/L terkait dengan revisi anggaran. Untuk mengoptimalkan pencapaian terhadap indikator tersebut, dapat dibentuk suatu forum non-formal dalam internal Inspektorat I dimana dalam forum tersebut auditor dapat melakukan *brainstorming*

terkait dengan isu-isu pengawasan aktual yang ada dan menuangkannya dalam bentuk tulisan yang dapat diterbitkan.

Terkait indikator Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan, dari target sebesar 90% pada tahun 2015, Inspektorat I berhasil mewujudkan persentase kepuasan pelanggan yang sempurna atau sebesar 100%. Hal ini berhasil dicapai karena adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal terhadap standar-standar mutu kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan. Sudah diterapkannya ISO 9001:2008 pada Inspektorat Jenderal juga turut mendukung pencapaian tersebut.

## 2. Organisasi yang Efektif

Pada sasaran Organisasi yang Efektif, Inspektorat I menetapkan 2 (dua) indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diatas, yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008. Capaian sasaran secara umum **sangat baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **100%**. Sedangkan rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2	Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat I	B	B	100
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100

Indikator kinerja untuk sasaran tersebut adalah Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat I dengan target nilai SAKIP B dan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 dengan target 1 sertifikat. Nilai efektifitas organisasi Inspektorat I dapat diukur berdasarkan nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I sebesar 71 setara dengan predikat B, sedangkan penerapan sistem manajemen ISO 9001:2008 telah menghasilkan 1 sertifikat.

## 3. Perencanaan dan Penganggaran yang Berkualitas

Pada sasaran Organisasi yang Efektif, Inspektorat I menetapkan 2 (dua) indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diatas, yaitu Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan Persentase penyerapan anggaran Inspektorat I. Capaian sasaran secara umum **sangat baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **105,09%**. Sedangkan rincian

indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
3	Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 persen	90 %	105,88
		Persentase penyerapan anggaran Inspektorat I	90 persen	93,88 %	104,31

Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan Inspektorat I telah mencapai 90%. Pencapaian indikator ini dilihat dari pelaksanaan rencana kerja yang telah ditentukan dan dievaluasi menggunakan data dalam ALKI. Masih belum optimalnya nilai tersebut dikarenakan terdapat beberapa kegiatan pengawasan yang mengalami keterlambatan dibandingkan perencanaan, yaitu pada pemeriksaan kinerja satket STMI Jakarta, BSI Jakarta dan Puskom, serta kegiatan Monitoring dan Evaluasi SNI Wajib Bidang Elektronika.

Untuk Persentase penyerapan anggaran Inspektorat I, pada tahun 2015 dapat dicapai sebesar 93,88% dimana anggaran pada Inspektorat I telah terealisasi sebesar Rp 3.170.040.318,- dari Pagu anggaran sebesar Rp 3.376.517.000,-. Walaupun terjadi penurunan dari realisasi tahun 2014 yang mencapai 97,81%, pada tahun 2015 secara umum tingkat penyerapan anggaran berhasil memenuhi target dengan persentase capaian 104,31%. Penurunan sebesar 3,93% tersebut disebabkan karena adanya anggaran kegiatan pengawasan 2015 yang tidak terealisasi sepenuhnya, seperti kegiatan monitoring dan evaluasi SNI Wajib Bidang Elektronika.

Selain menyampaikan analisis capaian kinerja, pada LAKIP perlu disampaikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

## **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Berdasarkan monitoring penggunaan APBN, sampai dengan akhir 2015 realisasi keuangan Inspektorat I adalah sebesar Rp.3.170.040.318,- atau sebesar 93,88% dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.376.517.000,-. Realisasi tersebut telah mencapai target yang diharapkan walaupun terjadi penurunan dari realisasi tahun 2014 yang mencapai 97,81%. Penurunan sebesar 3,93% tersebut disebabkan adanya anggaran kegiatan

pengawasan 2015 yang tidak terealisasi sepenuhnya, seperti kegiatan monitoring dan evaluasi SNI Wajib Bidang Elektronika.

Capaian realisasi berdasarkan jenis kegiatan secara fisik dan keuangan pada Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Capaian Realisasi Keuangan Inspektorat I Tahun 2015

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi Tahun 2015			Sisa Anggaran	
		Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	%	Jumlah (Rp.)	%
Laporan Hasil Audit Inspektorat I	1.251.090.000,-	90,00	1.228.433.440,-	98,19	22.656.560,-	1,81
Laporan Hasil Reviu Inspektorat I	686.370.000,-	90,00	677.266.900,-	98,67	9.103.100,-	0,38
Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Inspektorat I	857.276.000,-	90,00	736.235.578,-	85,88	121.040.422,-	14,11
Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat I	390.900.000,-	90,00	377.504.400,-	96,57	13.395.600,-	3,43
Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat I	190.881.000,-	90,00	150.600.000,-	78,90	40.281.000,-	21,10
total	3.376.517.000,-	90,00	3.170.040.318,-	93,88	206.476.682,-	6,11

## IV. PENUTUP

### A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat I tahun 2015, secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat I tahun 2014 telah berjalan baik, tercermin dari terealisasinya seluruh program dan hasil-hasil yang dicapai.
2. Pencapaian TAPKIN pun telah memenuhi target antara lain:
  - a. Nilai temuan BPK untuk hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA. 2014 adalah sebesar Rp 8.830.323.972,43 dari total Pagu anggaran Kementerian Rp 2.656.276.729.000,- atau sebesar 0.3324%. Nilai tersebut dibawah persentase *materiality threshold* temuan BPK, yaitu 3%.
  - b. Realisasi nilai SAKIP Kementerian yang diperoleh pada tahun ini mengalami peningkatan dimana skor yang berhasil dicapai adalah 73,90 atau mencapai sebesar 105,57% dari target yang ditetapkan.
  - c. Pencapaian dari indikator persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I untuk SAKIP Eselon I pada unit kerja dalam cakupan pengawasan Inspektorat I adalah BPKIMI dengan capaian sebesar 76,01% (predikat A) dan Direktorat Jenderal IUBTT sebesar 59,90% (predikat CC). Nilai akhir dari hasil evaluasi SAKIP tersebut telah diplenokan dan disampaikan kepada Biro Perencanaan sehingga rata-rata persentase nilai mencapai sebesar 67,96%.
  - d. Pencapaian dari indikator kinerja Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum pada tahun 2015 adalah 78,57% dimana dari 14 unit yang memberikan pelayanan publik masih terdapat 3 unit belum menerapkan standar pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
  - e. Pada tahun 2015, dari 16 satker yang termasuk dalam cakupan pengawasan Inspektorat I, terdapat 8 satker yang telah menerapkan sistem pengendalian internal hingga level 3 atau dapat dikatakan capaian sasaran ini secara umum sangat baik sebesar yakni 133,34% dari target sebanyak 6 satker.
  - f. Pada indikator Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti, untuk tahun 2015, Inspektorat I telah melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SNI Wajib Bidang Elektronika untuk Produk Pompa Air dan menghasilkan 1 rekomendasi terkait kebijakan pelaksanaan SNI Wajib atau mencapai 100% dari target 1 rekomendasi.

- g. Pencapaian dari indikator persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT adalah 94,63%, dimana pelaksanaan PKPT dilaksanakan reuiu pada 16 unit satker dan audit kinerja pada 3 unit satker pengawasan Inspektorat I.
- h. Pencapaian indikator persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan dihitung berdasarkan pada pengawasan yang menggunakan kartu kendali, yaitu audit kinerja dengan cara membandingkan kartu kendali audit kinerja yang sesuai dengan jumlah semua audit kinerja, yaitu 24 unit satker pengawasan atau 87,50%.
- i. Untuk Indikator kinerja Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian, pada tahun 2015 opini WTP berhasil dipertahankan.
- j. Untuk Indikator kinerja Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat I dengan target 90%, berhasil dipenuhi sebesar 93,33%.
- k. Pencapaian indikator Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan pada tahun 2015, dari target sebanyak 4 (empat) auditor, gagal untuk dipenuhi atau tidak ada auditor yang mempublikasikan karya tulisnya.
- l. Terkait indikator Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan, dari target sebesar 90% pada tahun 2015, Inspektorat I berhasil mewujudkan persentase kepuasan pelanggan yang sempurna atau sebesar 100%.
- m. Indikator kinerja untuk sasaran tersebut adalah Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat I dengan target nilai SAKIP B dan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 dengan target 1 sertifikat. Nilai efektifitas organisasi Inspektorat I dapat diukur berdasarkan nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I sebesar 71 setara dengan predikat B, sedangkan penerapan sistem manajemen ISO 9001:2008 telah menghasilkan 1 sertifikat.
- n. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan Inspektorat I telah mencapai 90% atau melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 85%.
- o. Untuk Persentase penyerapan anggaran Inspektorat I, pada tahun 2015 dapat dicapai sebesar 93,88% dimana anggaran pada Inspektorat I telah terealisasi sebesar Rp 3.170.040.318,- dari Pagu anggaran sebesar Rp 3.376.517.000,-. Capaian tersebut juga telah melewati target yang ditetapkan, yaitu 90%.

3. Tingkat penyerapan anggaran Inspektorat I sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 93,88%.

#### **B. PERMASALAHAN/KENDALA**

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Inspektorat I tahun 2015, yaitu beban kerja auditor yang cukup tinggi pada tahun 2015 berupa penugasan diluar PKPT yang telah ditetapkan, seperti permohonan keikutsertaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat inspektorat Jenderal, permohonan dari satker untuk melakukan cek fisik bantuan peralatan/mesin dalam rangka hibah, pemeriksaan khusus terkait aduan masyarakat serta reuiu RKA-K/L terkait dengan revisi anggaran, sehingga menyebabkan kegiatan pengawasan yang mengalami keterlambatan dibandingkan perencanaan, seperti pada pemeriksaan kinerja satket STMI Jakarta, BSI Jakarta dan Puskom, serta kegiatan Monitoring dan Evaluasi SNI Wajib Bidang Elektronika.

#### **C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN**

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Itjen dan melakukan penyesuaian PKPT terhadap jadwal pengawasan yang dilakukan untuk tahun 2016.
2. Melakukan perubahan/revisi terhadap anggaran yang tidak dapat terlaksana sehingga fungsi pengawasan menjadi lebih optimal.
3. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Itjen terhadap permasalahan realisasi keuangan di tahun 2015 agar tidak terulang kembali.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I ini disusun, yang menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasi yang dimuat didalamnya dan diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal.

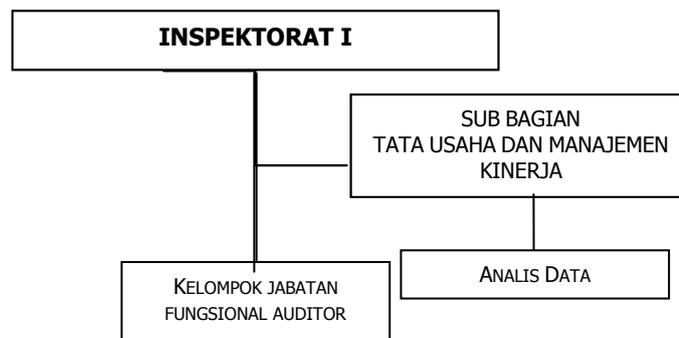
**Inspektur I**

**Pranata**

## LAMPIRAN

### Sumber Daya Manusia di Inspektorat I

Pada tahun 2015 ini, Inspektorat I memiliki total pegawai sebanyak 16 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 9 (sembilan) orang Auditor, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja, serta 5 (lima) orang fungsional umum sebagai analis data.



No	Nama	Jabatan
1	Hilman	Inspektur I
2	Faisal Iskandar	Auditor Ahli Madya
3	Cecep Kurmana	Auditor Ahli Madya
4	Abdul Hamid	Auditor Ahli Madya
5	Kusnadi Heryanto	Auditor Ahli Pertama
6	Jelita Berlina	Auditor Ahli Pertama
7	Riko Lesmana Oetarman	Auditor Ahli Pertama
8	Ridja Muda Utama	Auditor Ahli Pertama
9	Abu Naim Toyib	Auditor Ahli Pertama
10	Agung Tri Utomo	Auditor Ahli Pertama
11	Asnawi	Ka. Subbag TU dan Manajemen Kinerja
12	Sudiman	Analisis Data
13	Dwi Harjanto	Analisis Data
14	Indra Laksmiana	Analisis Data
15	Risiniarti	Analisis Data
16	Ayu Budiarti	Analisis Data

**Formulir Penetapan Kinerja Inspektorat I Tahun 2015**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Hilman  
Jabatan : Inspektur I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Syarif Hidayat, MM  
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

**Pihak pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Jakarta, Januari 2015**

**Pihak Kedua**

**Ir. Syarif Hidayat, MM**

**Pihak Pertama**

**Drs. Hilman**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015**

**INSPEKTORAT I**

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>			
1.	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang - undangan	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kementerian Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	Predikat B 85 %
3.	Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 %
4.	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3	6 Satker
5.	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	1 Rekomendasi Kebijakan
<b>PERSPEKTIF PROSES INTERNAL</b>			
6.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 %
		Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan	80 %
		Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian	WTP
<b>PERSPEKTIF PEMBELAJARAN ORGANISASI</b>			
7.	Meningkatnya kemampuan SDM APIP	Persentase pegawai yang mendapatkan diikat dari seluruh pegawai Inspektorat I	90 %
		Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan	4 Orang
		Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90 %
8.	Organisasi yang efektif	Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat I	B
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	1 Sertifikat
9.	Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 %
		Persentase penyerapan anggaran Inspektorat I	90 %

Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I      Anggaran Rp 3.376.517.000,-

Jakarta, Januari 2015

Inspektur Jenderal



Ir. Syarif Hidayat, MM

Inspektur I



Drs. Hilman